BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Salah satunya di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tidak akan terlepas dari penggunaan barang dan jasa. Tidak hanya individu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tetapi juga perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta karena pemenuhan barang dan jasa tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendukung kegiatan operasional perusahaan.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Oleh karena itu penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna atau pihak yang bawenang.

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi yang menunjukkan kompleksitas tentang kualitas laporan pengadaan barang/jasa khususnya yang terjadi dilingkup perusahaan milik pemerintah, karena ketidakpatuhan para pihak-pihak yang terlibat pengadaan barang/jasa terhadap Keppres No.80/2003. Kasus Mark Up Pengadaan Merpati MA60, proyek pembelian pesawat Merpati MA60 sebanyak 15 pesawat dari PT. Xian China senilai total US\$ 215 juta.

Pembelian pesawat ini dibeli dengan harga US\$ 14,3 juta sedangkan harga pasaran saat itu untuk pesawat jenis MA60 adalah US\$ 11,2 juta. Sehingga besaran *mark up* yang merugikan negara sebesar US\$ 46,5 juta. BPK menemukan kejanggalan pada proses pengadaan 15 pesawat MA60 ini, pengadaannya tidak pernah direncanakan secara resmi pada kurun waktu 2006-2008, padahal penjakannya sudah dimulai di th 2005. Dana pembelian pesawat MA60 ini dari Pemerintah dalam bentuk *Subsidiary Loan Agreement* (SLA). Padahal perjanjian pinjaman tersebut baru ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Pemerintah Indonesia dengan The Expor-Import Bank of China (CEXIM Bank) pada tanggal 5 Agustus 2008. Dengan kata lain pembelian MA60 melanggar undang-undang karena Merpati dan Pemerintah meneken perjanjian sebelum mendapat persetujuan dari Banggar DPR. (Media Nusantara Kamis, 26 April 2012).

Adapun kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia yakni pengelembungan (*mark up*) atas premi *hull & aviation Insurance* (asuransi risiko rangka pesawat) yang dilakukan oleh BUMN PT Jasa Indonesia (Jasindo). PT Jasindo terbukti telah menggelembungkan premi asuransi *Hull & Aviation* (rangka

pesawat) PT Garuda (GIA) sebesar US\$ 14-18 juta per tahun (Rp. 160 – 200 miliar / tahun) dari premi asuransi yang wajar atau premi asuransi sejenis yang tersedia di pasar asuransi. Menurut Dirkeu GIA premi asuransi Hull & Aviation seharusnya hanya US\$ 14-16 juta atau maksimal Rp. 160 miliar per tahun, tapi oleh PT Jasindo dinaikan (*mark up*) menjadi hingga US\$ 32 juta (Rp. 360 miliar) pertahun. (<http://yudisamara.com/2014/04/27/korupsi--membelit-garuda-indonesia/>)

Kasus lain yang baru terjadi di tahun 2015 yaitu Presiden Jokowi menunjuk tiga kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional, Kementerian dalam Negeri, dan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang mulai berlaku sejak 6 Mei lalu. Jokowi mengatakan pengadaan barang dan jasa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan belanja daerah mencapai Rp. 1000 triliun. Sementara pengadaan barang dan jasa di badan usaha milik negara sebesar Rp. 1600 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp. 2600 triliun. Dalam Inpres ini dirumuskan 96 butir aksi PKK yang harus dilaksanakan selama tahun 2015, Jokowi mengatakan penyusunan Inpres melibatkan kementerian kelembagaan hingga pegiat antikorupsi. Dengan demikian akan terlihat apakah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah telah maksimal menetapkan aksi-aksi tersebut. “Dengan adanya Inpres pemerintah melalui berbagai lembaga dan instansi bertekad secara sungguh-sungguh melakukan

langkah signifikan untuk mencapai upaya pemberantasan korupsi.” (Bangka Pos Rabu, 27 Mei 2015)

Damayanti, dkk (2014), menyebutkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang seperti kualitas sumber daya manusia terkait dengan pemahaman prosedur, dukungan manajemen, dan penerapan sistem *e-Procurement*. Selain itu pula aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum, pengawasan dan transparansi proses tender. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut pemerintahan melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ditertibkannya berbagai peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tujuan dari berlakunya Keputusan Presiden No80 Tahun 2003 tersebut agar pengadaan barang dan jasa dapat lebih efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

Proses pengadaan barang dan jasa selama ini dilakukan dengan cara konvensional dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang dan jasa atau pengguna barang dan jasa atau panitia pengadaan. Pengadaan yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang didapat adalah para pengguna dan penyedia barang atau jasa bertemu secara langsung dan melakukan tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bersama-sama. Tetapi kelemahan dari tahap-tahap pelaksanaan penyediaan barang atau jasa ini dinilai banyak merugikan, seperti mudahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

berkembang, serta kurangnya transparansi. Pengadaan konvensional juga membutuhkan waktu yang lama serta biaya besar, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap menurunnya kualitas pengadaan.

Usaha untuk menutup kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam proses pengadaan dan adanya berbagai perubahan dan transformasi yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya suatu organisasi yang transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Didukung oleh kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi atau teknologi informasi saat ini telah membawa revolusi tersendiri dalam dunia bisnis, salah satunya dengan penerapan *e-procurement*.

E-procurement merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) pengadaan secara elektronik tersebut diharapkan mampu membantu serta meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam melakukan proses pengadaan. *E-procurement* di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang atau Jasa yang menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* merupakan pengadaan Barang atau Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan *E-procurement* di antaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan,

mendukung proses monitor dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi terkini. (Willem Siahaya, 2012:80)

Kaihatsu (2006) dalam Odi Setiawan(2014) menyatakan bahwa proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yakni berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE). Saat ini *E-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan. Dengan e-Procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik tersebut mendapat sertifikat secara internasional.

Di dunia internasional, *e-procurement* bukanlah hal yang baru lagi dan sudah diterapkan di beberapa negara, diantaranya Australia. Keberhasilan Australia dalam menerapkan *e-procurement* turut ikut andil dalam perkembangan sistem *eprocurement* di negara lain, termasuk Indonesia. Australia sebagai salah satu negara pelopor pelaksanaan *eprocurement* yang dimulai pada tahun 1990 telah menggunakan *e-procurement* sebagai salah satu alat dalam efisiensi penggunaan anggaran serta mempermudah dalam penyediaan barang dan jasa. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *National e-Procurement Research Project Australia* pada tahun 2005–2006 telah memberikan gambaran yang jelas

mengenai tingkatan penggunaan *e-procurement* dan ketertarikan mereka untuk menggunakan *e-procurement* pada masa yang akan datang, dimana hampir dari separuh responden telah menggunakan *e-procurement* untuk kegiatan pembelian mereka.

Penerapan *e-procurement* yang dilakukan oleh negara Australia menjadi tolak ukur implementasi *eprocurement* di Indonesia yang dipelopori oleh pemerintah kota Surabaya dan Departemen Pekerjaan Umum (DPU). Pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2009. Sebagai pelopor sistem *e-procurement*, keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan sistem *eprocurement* berupa efisiensi anggaran hingga 10% karena adanya standarisasi harga dan analisa standar belanja, efisiensi terhadap alokasi yang telah ditetapkan hingga 25%, terencanaanya proses pengadaan barang/jasa, dan pelaporan yang jelas atas kegiatan dan penyerapan anggaran dapat diakses oleh pimpinan dan masyarakat secara terbuka dan kapan saja melalui internet. (www.surabaya-e-procurement.or.id, 2009 dalam Nightisabha *et al.*, 2009).

Pelaksanaannya *E-procurement* masih mengalami banyak kendala. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyorot adanya tiga permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan *E-procurement* di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia seperti ketidaksiapan personalia, sistem dan infrastruktur. Menurut ICW, pihak panitia atau pejabat pembuat komitmen (PPK) masih banyak yang belum bisa mengoperasikan internet, bahkan sampai ada yang belum memiliki email. Hal yang sama juga terjadi pada penyedia barang dan jasa.

Selain itu, di beberapa daerah kerap terjadi pemadaman listrik sehingga proses pelelangan pun dinilai bisa terganggu hingga batal dilaksanakan. Sementara permasalahan kedua adalah terkait kelemahan hukum administrasi di Indonesia sehingga pada titik tertentu, sistem *E-procurement* itu dinilai tidak aman karena tidak terjamin rahasianya dan mudah diacak-acak pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan persoalan ketiga adalah meskipun sudah dilakukan secara elektronik namun masih juga ditemukan kejanggalan pengadaan barang dan jasa lewat internet selama tahun 2007 (<http://www.investor.co.id>).

Penelitian mengenai penerapan *E-Procurement* telah banyak dilakukan, seperti penelitian Amelia, dkk (2012) dengan judul Penerapan *E-Procurement* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang, penelitian Astri Damayanti dan Ardi Hamzah (2014), dengan judul Pengaruh *E-Procurement* Terhadap *Good Governance*, penelitian Wahyu Hary Wijaya (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Kinerja dan Efisiensi Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya dan penelitian Kartikaningrum (2007) dengan judul Hubungan *e-procurement* terhadap Pengadaan Barang pada Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan pengembangan atas penelitian dari Amelia, dkk (2012) melalui penambahan pendekatan verifikasi pada unit analisisnya dan melakukan modifikasi atas penelitian dari Astri Damayanti dan Ardi Hamzah (2014); Wahyu Hary Wijaya (2012) dan penelitian dari Kartikaningrum (2007) melalui penggunaan variabel kualitas laporan pengadaan barang sebagai variabel terikat dengan lokus penelitian pada Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul: **“Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Kualitas Laporan Pengadaan Barang pada PT PLN (Persero).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *E-procurement* pada PT. PLN (Persero) Jabar-Banten
2. Bagaimana kualitas laporan pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Jabar-Banten
3. Seberapa besar pengaruh penerapan *E-procurement* terhadap kualitas laporan pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Jabar-Banten

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *E-procurement* dalam kaitanya dengan kualitas laporan pengadaan barang dalam sebuah perusahaan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai pengaruh penerapan *E-procurement* terhadap kualitas pengadaan barang, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *E-procurement* pada PT. PLN (Persero) Jabar-Banten.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Jabar-Banten.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *E-procurement* terhadap kualitas laporan pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Jabar-Banten.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penelitian

Bagi penelitian berguna untuk menambah wawasan penelitian khususnya mengenai pengaruh penerapan *E-Procurement* terhadap kualitas laporan pengadaan barang, selain itu juga sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai penerapan *E-procurement* dan kualitas laporan pengadaan barang/jasa.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pelaksanaan *E-procurement* terhadap kualitas pengadaan barang/ jasa.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu dan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana pengaruh penerapan *E-procurement* terhadap kualitas laporan pengadaan barang/jasa.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai Pengaruh Penerapan *E-procurement* terhadap Kualitas Laporan Pengadaan Barang.Selain itu, dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktek yang sebenarnya di dalam sebuah perusahaan yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.Selain itu, penulis juga mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) Jabar-Banten yang berlokasi di JL.Sokarno Hatta No. 422. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan di teliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah di tentukan oleh PT. PLN (Persero) Jabar-Banten.